

**UPAYA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR
DALAM MENGOPTIMALISASIKAN KETERSEDIAN PANGAN
TAHUN 2011– 2013**

By: Dewi Sarpika

Email: dewi.sarvika@gmail.com

supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761-6327**

ABSTRACT

Food security is the agricultural sector, which has a strategic role in the development of the regional economy. Kabupaten Rokan Hilir is the largest rice production to reach 50-55% in Riau. Badan Ketahanan Pangan to seek sustainable food security through programs that try stability of rice back. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2012 on Food. Article 41 which reads "Food Diversification is an effort to increase the availability of Food are diverse and are based on potential local resources to meet Food consumption patterns are diverse, nutritionally balanced, safe and fulfilled.

The purpose of this research is to answer the problems that exist in the study first, to know efforts the Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir in optimizing availability of food; second, to identify and explain the factors that influence efforts the Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir in optimizing availability of food Year 2011-2013. This type of research is a qualitative research method. The location of this research conducted in Kabupaten Rokan Hilir Province Riau. Data collection techniques including observation, documentation studies and field studies (interview), and analyze the data descriptive.

The research showed that the implications of the implementation of optimize food the Local Government Kabupaten Rokan Hilir delegated to the Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir as co-administration the conduct prevention and counseling programs in rice production availability. in the context of what happened today with the rampant land conversion of food to non-food in Rokan Hilir indicate that the lack of local government efforts in the implementation of supervision and counseling in the field of agriculture. In addition, an increase in between institutions counseling is also indispensable in the fight against land conversion to non-edible food in order to achieve an increase in the surplus rice in Riau.

Keywords: Badan Ketahanan Pangan, Optimizing Availability of Food, counseling

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan menghendaki ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga. Dalam arti setiap penduduk dan rumah tangga mampu untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup. Permasalahan aspek produksi diawali dengan ketidakcukupan produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan produksi pangan yang relatif lebih lambat dari pertumbuhan permintaannya. Permasalahan ini akan berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan bagi penduduk akan semakin terbatas akibat kesenjangan yang terjadi antara produksi dan permintaan. Selama ini, permasalahan ini dapat diatasi dengan impor bahan pangan tersebut. Namun, sampai kapan bangsa ini akan mengimpor bahan pangan dari luar, Karena hal ini tidak akan membuat bangsa ini berkembang. Sebaliknya akan mengancam stabilitas ketahanan pangan di Indonesia dan juga mengancam produk dalam negeri.

Hampir 50-55% perekonomian kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian, sehingga pembangunan di bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian, guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan, serta sekor-sektor lainnya. Berbagai program yang telah dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir diantaranya:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3. Program Rumah Pangan Lestari (RPL)
4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
5. Program Analisis ketersediaan pangan (beras).
6. Program gerakan pangan beragam, bergizi, dan berimbang

Berdasarkan data tersebut ketahanan pangan dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan dimulai dari sejak tahun 2011-2013 pertumbuhan produksi beras di Kabupaten Rokan Hilir makin menurun dari sejak tahun 2011 sampai sekarang penghasilan padi semakin memburuk yang dahulunya Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu lumbung penghasilan beras di Riau Hampir 50%-55% hasil produksi beras berasal dari Kabupaten Rokan Hilir sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian dapat mendorong/ menopang disektor industri dan sektor perdagangan.

Berikut ini adalah data perbandingan hasil tanaman produksi padi dari tahun 2001-2010 yang perkembangannya mengalami peningkatan hasil produksi tanaman padi di Kabupaten Rokan Hilir masih menghasilkan surplus padi terbesar di Riau.

Permasalahan pertanian yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir berdampak pada permasalahan ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat urgent untuk dapat diselesaikan, alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan yang saat ini terjadi adalah akibat dari maraknya konversi tersebut. Para petani diharapkan untuk tidak mengalihfungsikan areal sawah yang saat ini terus digarap untuk

kepentingan lain diluar produksi padi. Jika hal demikian terus dilakukan, maka dalam jangka panjang alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan itu jelas akan mengancam ketahanan pangan di Rokan Hilir.

Alih fungsi lahan jelas sangat berpengaruh besar terhadap target surplus beras di Rokan Hilir. Dimana dahulunya Kabupaten Rokan Hilir salah satu lumbung padi dan penghasil beras terbesar di Riau yakni 40.000 Ton pertahun, namun sejak terjadinya alih fungsi lahan surplus beras tersebut berkurang, dimana pada Tahun 2013 lalu hanya tinggal 2000 Ton saja. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menanggulangi permasalahan ketahanan pangan diantaranya adalah:

1. Pembukaan areal persawahan baru, di kabupaten Rokan Hilir Merupakan Intruksi dari Bupati Rokan Hilir kepada para petani agar tidak mengalihfungsikan lahan persawahan menjadi kebun sawit.
2. Membangun sarana irigasi di Kepenghuluan Mukti Jaya kecamatan Rimba Melintang, merupakan upaya pemerintah (Bupati) Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatasi permasalahan pangan di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Badan Ketahanan Pangan kabupaten Rokan Hilir dalam mencari dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengatasi permasalahan pangan, termasuk LSM.

Komitmen Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam menetapkan 3.000 hektare lahan pertanian khususnya tanaman

padi yang ada bisa diselamatkan dan dilindungi di Kabupaten Rokan Hilir. Kemandirian pangan menjadi keharusan, karena pangan adalah urusan pokok. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya mempertahankan luasan lahan pertanian. Lebih jauh selain selain alih fungsi lahan yang menjadi kekhawatiran, perubahan iklim ekstrim dan rusaknya infrastruktur menjadi kendala yang harus diatasi.

Dalam studi terdahulu yang pernah dilakukan di kota pekanbaru lebih cenderung menkoreksi tentang Tupoksi BKP dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di kota pekanbaru. Apabila di kaitkan dengan permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir sangat Jauh berbeda dimana sektor pertanian di Kabupaten Rokan Hilir mampu menyuplai padi hampir 40% di Provinsi Riau. Meskipun demikian permasalahan ketahanan pangan masih sulit teratasi secara maksimal.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh "*Upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan tahun 2011-2013*"

b. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2011-2013?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2011-2013?

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2011-2013
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2011-2013.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2011-2013.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2011-2013
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini

b. Kegunaan Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (*Lexi J. Meleong, 1991:30*). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis lakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan bahan pangan Tahun 2011-2013. Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya-Upaya Badan Ketahanan Pangan Dalam Mengoptimalkan Ketersediaan Pangan

Badan ketahanan pangan kabupaten Rokan Hilir, mengupayakan ketersediaan pangan di sektor swasembada produksi padi dengan mengadakan program-program yang dapat terjangkau oleh masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani antara lain yaitu:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Program Rumah Pangan Lestari (RPL)
4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
5. Program ketersediaan pangan (beras)
6. Program gerakan pangan beragam, bergizi, dan berimbang

Program-program tersebut untuk memantau kecukupan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berupaya untuk agar terpenuhinya kebutuhan dan ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir menerapkan atau menyelenggarakan program-program ketersediaan dan kebutuhan masyarakat maupun petani, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir menyalurkan bantuan melalui program PDMP (Pengembangan Desa Mandiri

Pangan). Adapun kegiatan pengembangan desa mandiri pangan dilaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dan menunjang kesejahteraan petani.

Dalam mewujudkan daerah yang memiliki penghasilan produksi padi yang maju dan lumbung produksi yang terbesar, pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan petani agar pelaksanaan pertanian dan hasil produksi tanaman meningkat. Pemerintah melaksanakan bantuan pertanian melalui program PDMP (pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan), tujuan program PDPM untuk pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah, pengembangan sistem ketahanan pangan, meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan maupun untuk mensejahterakan para petani.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan dengan memberdayakan masyarakat agar terus menghidupkan semangat petani, agar mampu mengatasi masalah pangan secara mandiri, serta dapat mewujudkan daerah lumbung produksi padi yang lebih banyak dalam peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan produktifitas, produksi dengan pendapatan yang baik melalui usaha tani maupun usaha lainnya:

Dalam hal ini upaya Badan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan diantaranya:

1. Meningkatkan penguatan terhadap kapasitas dan daya dukung kelembagaan dan infrastruktur pangan
2. Meningkatkan efektifitas regulasi sistem distribusi dan pemantauan harga pangan
3. Meningkatkan manajemen perkembangan dan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dan kecamatan
4. Mengidentifikasi daerah rawan pangan serta mengupayakan pemecahannya.
5. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan kualitas pangan serta mengoptimalkan ketersediaan pokok beras.
6. Mengembangkan diversifikasi pangan melalui lahan marginal termasuk lahan perkarangan
7. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan dalam peningkatan kebutuhan pangan

Poin-poin yang tertulis diatas adalah upaya yang ingin dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir diseluruh kecamatan yang ada di Rohil, agar semua daerah-daerah bisa menghasilkan lumbung padi yang terbaik.

3. Program Rumah Pangan Lestari (RPL)

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Rokan Hilir berencana mengembangkan program Rumah Pangan Lestari (RPL) untuk seluruh daerah. Disebabkan,

keberadaan RPL tersebut sangat perlu dikembangkan di semua daerah yang ada di Rohil yang memiliki potensi. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang “pangan” Pasal 2 yang berbunyi “Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.”

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL) menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi, memanfaatkan sentra-sentra pertanian unggulan, dan dapat dicapai masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui gerakan ini dapat memenuhi produksi beras dan swasembada pangan.

Para petani Kabupaten Rokan Hilir sangat membutuhkan sokongan pemerintah, sosialisasi BKP dalam pemanfaatan lingkungan dan penyuluhan tanaman pangan untuk mengurangi kemiskinan maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk itu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan program untuk mengelola kebutuhan rumah tangga sendiri. Dimana masyarakat/petani tidak memasokan kebutuhan rumah tangga terutama pangan, hal ini dapat membantu menagulangi masalah kekurangan pangan dan kemiskinan. Sementara di daerah Kab. Rohil yang telah mengadakan RPL ini, dari Desa Muktijaya Kecamatan Rimbo Melintang sehingga untuk kebutuhan hasil pertanian Kepenghuluan Mukti Jaya sudah berlebih dan bisa

memasok untuk daerah lain seperti beras.

4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Pemberdayaan penyuluhan pangan lapangan adalah bentuk pemerintah adalah sebagai penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau Peredaran Pangan oleh pelaku usaha pangan (petani). Dengan adanya pemerintah menyediakan petugas Penyuluh petani lapangan (PPL) untuk membantu petani dalam pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi tentang pengetahuan wawasan bercocok tanam maupun ketersediaan pangan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Pertenakan (Distanak) Kabupaten Rokan Hilir membuat kebijakan mengadakan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dengan menurunkan anggota penyuluhan tanaman pertanian kelapangan disetiap Kecamatan, dan seluruh desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Namun jumlah tenaga PPL saat ini baru mencapai 70 orang, sementara dari jumlah tersebut tidak sebanding dengan luasnya lokasi. Kurangnya anggota pemberdayaan penyuluhan lapangan PPL dalam melaksanakan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi sehingga program pemberdayaan penyuluhan lapangan (PPL) tidak dapat terlaksana secara sempurna. Padahal program PPL merupakan program pendukung untuk membangkitkan kemampuan petani.

5. Program ketersediaan pangan (beras)

Indonesia bahan makanan pokok salah satunya adalah beras, karena mengandung sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir berusaha mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup, dan menjadikan daerah penghasil beras terbaik. Landasan hukum yang mendukung tentang kebijakan ketersediaan pangan tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 18.Tahun 2012 tentang Pangan bagian BAB IV Ketersediaan Pangan , Pasal 15 yang berbunyi; (1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain. Dalam bidang pertanian tanaman pangan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir merencanakan sasaran dan realisasi tanaman padi, untuk tahun kedepannya mampu menghasilkan produksi beras yang berkecukupan.

6. Program Gerakan Pangan Beragam, Bergizi, dan Berimbang

Program Gerakan Pangan Beragam, Bergizi, dan Berimbang Badan Ketahanan Pangan sebagaimana mana di amanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan upaya untuk memenuhinya merupakan hak asasi bagi setiap individu. Salah satu sasaran penting dalam pembangunan nasional adalah menyediakan jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dan sekaligus meningkatkan mutu gizi penduduk.

Rata-rata angka kecukupan gizi (AKG) tingkat ketersediaan perkapita perhari penduduk Indonesia yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNGP ke VIII tahun 2004 adalah sebesar 2.200 Kalori Energi dan 57 protein., ketersediaan pangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Skor pola pangan harapan Kabupaten Rokan Hilir.

Faktor yang mempengaruhi upaya Badan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan Tahun 2011-2013

Ketahanan Pangan sebagaimana mana di amanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Adapun factor yang mempengaruhi upaya Badan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan ditentukan dalam Implementasi kebijakan yang akan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya: Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor

communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengupayakan dalam mengoptimalkan ketersediaan padi, dimana daerah yang pernah menghasilkan lumbung padi terbesar di Riau. Namun sekarang ini bisa dikatakan terjadi penurunan produksi padi diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor yang membuat penurunan produksi padi yaitu:

a. Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Oleh sebab itu faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan setiap unsur manusia dan sumberdaya akan selalu berusaha dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukannya.

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-

keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementors) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan dalam penelitian saya.

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu sebagai berikut : Transmisi, Kejelasan, Konsistensi. selain itu Edward III mengemukakan ada 6 faktor terjadinya ketidak jelasan komunikasi kebijakan yaitu: kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari suatu pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan, dapat dilihat dengan beberapa kriteria yaitu :

1. Tranmisi Seringkali terjadinya masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskommunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Penyampaian komunikasi

dilakukan untuk penyampaian program ketersediaan pangan yang lebih dititik beratkan pada peningkatan produksi padi. Namun program yang dijalankan melalui sosialisasi kepada petani, agar tidak masalah kegagalan produksi dan pengalihan fungsi lahan ke non pangan.

2. Kejelasan. kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi kebijakan tersebut. Tetapi dalam kenyataan yang diakui oleh salah satu petani terhadap diakui yang namanya kejelasan sosialisasi dan penyuluhan tanaman pangan dikarenakan belum meratanya sosialisasi. Penyampaian komunikasi yang dijalankan hanya berupa kegiatan penyuluhan semata, yang dilakukan oleh petugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian dan menghimbau agar masyarakat petani melakukan pemindahan pangan ke non pangan alih fungsi lahan maupun bangunan lainnya
3. Konsistensi. Arus komunikasi yang terjadi harus tegas dan jelas. Bila tidak , maka akan terdapat kelonggaran bagi para pelaksana untuk menfsirkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perlu dihindari adanya suatu hal yang dapat menimbulkan suatu kegaduhan, kebingungan diantara para pelaksana sebagai akibat dari adanya kelonggaran dalam

menafsirkan. Dalam hal ini, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir menegaskan program peningkatan produksi padi yang diadakan untuk mencapai kebutuhan yang cukup dan menjadi swasembada yang berkualitas. Maka dari itu Pemerintah menugaskan adanya penyuluhan pangan lapangan PPL.

b. Faktor Sumberdaya

Sumber daya penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Selain itu, harus ada kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai tugas yang akan dikerjakan.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya seperti sumber daya manusia, material dan metoda. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Ketersediaan Sumber daya manusia yang mempunyai Kompetensi dan kapabilitas untuk menjalankan system manajemen pengelolaan lahan pangan yang direncanakan, dalam hal ini menjadi suatu kebutuhan yang nyata, Sumber daya manusia ini meliputi tenaga-tenaga operasional lapangan, para analisis, dan pengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen

sumberdaya lahan terutama lahan pertanian padi.

1. Kemampuan implementator

Petugas dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar dapat efektif. Yaitu kemampuan petugas dalam memahami kebijakan dan keahlian yang dimilikinya .

Sumber Daya Manusia dalam hal ini PPL dengan anggota yang ditugaskan disetiap daerah memanglah kurang sehingga tidak dapat mendukung tersampainya informasi dengan baik sedangkan berdasarkan jumlah PPL kurang memadai karena mengingat lokasi dan jumlah anggota penyuluhan lapangan disetiap Desa yang berpotensi dan memiliki luas lahan akan menurunkan tingkat produksi padi.

Pemahaman terhadap Kebijakan Dalam implementasinya di lapangan, para implementor mengerti akan kebijakan, Dalam menjalankan program ada baiknya kita memperhatikan sumberdaya yang tersedia terlebih dahulu.

Potensi atau kemampuan penyuluhan lapangan SDM rendah, dan kurang pula sosialisasi terhadap program ketersediaan pangan ini. sedangkan sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada dimasyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

Bahwa ketersediaan tenaga penyuluh dan anggaran masih jadi masalah tersendiri. Menurut **Edward (1980)** bahwa sumber-

sumber (resources), memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena tidak akan efektif apabila sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai, diantaranya Dalam sumberdaya diperlukan beberapa hal diantaranya:

a. Staff

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Pemerintah menrencanakan petugas yang berkualitas, dalam hal ini dimaksudkan anggota petugas PPL di lakukan yang memiliki potensi sesuai dengan SDM yang dimilikinya, adapun petugas PPL berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pertanian yang berpengalaman dan tamatan D3, S1, dan SMA.

Dalam mewujudkan swasembada berkelanjutan dan sasaran produksi tanaman pangan, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir menempuh langkah melalui catur strategi tanaman pangan di antaranya peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksindan penguatan kelembagaan. .

b. Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Anggaran yang diberikan pemerintah dalam hal ini berbeentuk bantuan pertanian. Hal ini, penulis lebih menayakan khusus tentang ketersediaan pangan dalam bentuk peningkatan produksi padi kepada pihak yang terkait. Anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupa bantuan kepada petani ada yang berupa lahan maupun modal. Modal yang di berikan bukan saja dalam bentuk uang, tapi berupa pupuk, pefside, gabah, alat perontok, bajak, dan lainnya. Bantuan ini, akan dibagikan disetip Kecamatan, berdasarkan daerah yang memiliki pontensi tanaman padi yang lebih bepontensi maupun menghasilkan.

c. Kewenangan

Kewenangan berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dillaksanakan. Badan Ketahanan pangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah.

d. Fasilitas

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan

implementasi suatu program atau kebijakan.

Sehingga dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh si pembuat kebijakan.

c. Faktor Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh si pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan isi undang-undang Nomor 41 tahun 2009 Pasal 44 ayat 1, Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. maka Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan salah satu penghasil lumbung padi terbesar di Riau, memiliki daerah yang berpotensi dalam tanaman penghasil padi. Kabupaten Rokan Hilir banyaknya melakukan pengalihan fungsi lahan diantaranya, Pertanian padi keperkebunan Kelapa sawit dan

pembangunan sarang burung walis yang banyak terjadi sampai saat ini.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir bekerja dan berusaha mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Rokan Hilir melalui tugas dan fungsinya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada aspek evaluasi. Disamping itu upaya pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, pelatihan serta penyuluhan akan terus dikembangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber ketahanan pangan Kabupaten Rokan Hilir salah satunya dari penghasil padi. Dari Tahun 2001-2010 merupakan daerah sentral produksi padi di Riau yang produksinya mencapai 50-55%, namun pada

Tahun 2011-2013 terjadi penurunan hasil produksi padi. Upaya Badan Ketahanan Pangan Rohil diterapkan dalam bentuk program.

2. Faktor penghambat dalam mengupayakan ketersediaan pangan dalam bentuk produksi padi yaitu pertama, kurangnya anggota pemberdayaan petani lapangan (PPL). Kedua, alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pangan, yaitu adanya perubahan lahan pertanian padi menjadi pembangunan sarang burung walet, perkebunan kelapa sawit dan pembangunan non pangan lainnya, sehingga menurunnya luas tanaman padi. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana petani (bantuan) dalam bercocok tanaman padi.

b. Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah atau Badan, Dinas dan Instansi maupun masyarakat yang terkait dalam melaksanakan upaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan, adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah maupun instansi yang terkait dalam pelaksanaan mengoptimalkan produksi swasembada padi (pangan)

yang berkelanjutan, harus menguatkan pengawasan dan penyuluhan pangan supaya tersedianya produksi tanaman padi yang berkecukupan, berkelanjutan, merata dan terpenuhinya kebutuhan pangan.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir agar segera mewujudkan Peraturan Daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelanggaran terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sehingga tidak adalagi terjadinya alih fungsi lahan pangan ke non pangan.
3. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan lapangan (PPL) kepada Kelompok Tani Kabupaten Rokan Hilir maupun petani.
4. Untuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir dan pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan harus memperhatikan kesejahteraan petani dan kebutuhan kondisi lapangan agar tidak adanya alih fungsi lahan dan penyalagunaan lahan daerah di Kabupaten Rokan Hilir, supaya kebutuhan ketersediaan pangan terpenuhi dan menjadi

- daerah penghasil lumbung padi yang tercukupi.
5. Untuk Masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait harus mendukung dalam mengoptimalkan ketersediaan pangan yang diajarkan oleh pemerintah dan mematuhi aturan yang ada, agar mengetahui kegunaan dan tujuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Affan Gaffar. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Alex S Nitisemito, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma S.S, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djakarta: PT. Djamatan.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Hasibuan, 2000, *Pelimpahan Wewenang*, jakarta: PT.BumiAksara.
- HAW. Widjaja.2002,*Otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta :PT Raja GrafindoPustaka.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Lexi, J. Meleong. (1991 dan 2000).*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. ArifNasution. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta: Mandar Maju.
- Koentjraningrat (ed).1988. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia.
- Koswara, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pasca Sarjana MIP, Jakarta.
- Ramlan Subakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Syarifudin Hidayat, (2002). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P Siagian, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta :Erlangga.
- Sukanto.(2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Winardi.1979.*Azas-Azas
Manajemen,* Alumni
Bandung: Bandung

b. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996
tentang *pangan*

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012
tentang *Pangan*

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009
tentang *Perlindungan Lahan*

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun
2002 tentang *Ketahanan Pangan*

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 13 Tahun 2007
tentang *Pembentukan
Organisasi, Kedudukan dan
Tugas Pokok Lembaga Teknis
Daerah Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir*

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 15 Tahun 2002
tentang *Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Rokan
Hilir*

Surat Keputusan Kepala Badan
Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 058 Tahun 2014 tentang
*Penetapan Petugas
Pendamping Kegiatan
Pengembangan Lumbung
Pangan Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Rokan Hilir*

c. Sumber bacaan dan lain lainnya

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
*Natuna : Pembangunan dan
Otonomi Daerah,*
(Pekanbaru:1996), Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau.

Koran Riau pos, 28 Maret 2013

Koran Pos Metro Rohil, 12 Agustus

2013 *Tentang: Tingkatn Produksi*

Padi, Rohil Perlu Cetak Sawah

Baru (untuk memperkuat

ketahanan pangan) Halaman : 11